

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - dilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik.

Eko Jaya - Rekoneptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia



Description: Indonesian laws on presidential, vice presidential elections, and political parties.

-Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - dilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik.

-Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - dilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik.

Notes: Includes the text of: Undang-Undang Tentang Partai Politik.

This edition was published in 2008



Filesize: 26.72 MB

Tags: #Undang

UNDANG

Tambunan, 1994, Pemilu Di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Bina Cipta, Bandung.

Presiden Indonesia

Keberatan dimaksud diajukan paling lambat 3 tiga hari atau 3 x 24 tiga kali dua puluh empat jam dan setelah itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan konfirmasi kepada KPU terhadap ada atau tidak adanya keberatan atas penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG

Kalau memilih siapa yang mengatakan, maka hal tersebut tidak akan menemukan kebenaran karena kebenaran bisa datang dari siapa pun juga.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau Zainal itu Pengacara atau Prinsipal? KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Presiden Indonesia

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Undang

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Pasal 140PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 2 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pasal 71 2 PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG

Bagaimanapun bila menganut model pemilihan satu putaran, pasangan calon yang Pasal 216Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tiga bulan dan paling lama 12 dua belas bulan dan denda paling sedikit Rp30.

Related Books

- [Joey](#)
- [Rimas varias en alabanza del nacimiento del Principe N.S. Don Balthazar Carlos Domingo.](#)
- [Experiments in photoelectricity.](#)
- [Mask in place - essays on fiction in North America](#)
- [Diversifying the farm business](#)